

Perihal: Kehadiran Myanmar pada Pertemuan Puncak ASEAN

SURAT TERBUKA KEPADA PARA PEMIMPIN ASEAN

Kepada: Para Pemimpin ASEAN

Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Perdana Menteri Brunei
Yang Mulia Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja
Yang Mulia Joko Widodo, Presiden Indonesia
Yang Mulia Thongloun Sisoulith, Perdana Menteri Laos
H.E Dato' Sri Ismail Sabri, Prime Minister of Malaysia
Yang Mulia Dato' Sri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia
Yang Mulia Rodrigo Roa Duterte, Presiden Filipina
Yang Mulia Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura
Yang Mulia Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Thailand
Yang Mulia Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Vietnam

Tembusan: Mitra Dialog ASEAN

Yang Mulia Will Nankervis, Duta Besar Australia untuk ASEAN
Yang Mulia Diedrah Kelly, Duta Besar Kanada untuk ASEAN
Yang Mulia Deng Xijun Duta Besar China untuk ASEAN
Yang Mulia Igor Driesmans, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN
Yang Mulia Shri Jayant N. Khobragade, Duta Besar India untuk ASEAN
Yang Mulia Chiba Akira, Duta Besar Jepang untuk ASEAN
Yang Mulia Lim Sungnam, Duta Besar Korea untuk ASEAN
Yang Mulia Pam Dunn, Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN
Yang Mulia Alexander Ivanov, Duta Besar Rusia untuk ASEAN
Yang Mulia Melissa A. Brown, Kuasa Usaha Misi Amerika Serikat untuk ASEAN

13 Oktober 2021

Yang Mulia sekalian,

Kami, organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, menulis surat kepada Anda untuk mendesak Anda agar tidak menyampaikan undangan kepada junta militer Myanmar ke KTT ASEAN yang akan datang pada tanggal 25 hingga 28 Oktober karena militer Myanmar telah terang-terangan mengabaikan Lima Butir Konsensus yang telah disepakati dalam Pertemuan Para Pemimpin ASEAN dan berlanjutnya penolakan untuk bekerja sama dengan ASEAN guna menerapkan perjanjian tersebut.

Kami menyambut baik pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia yang mempertanyakan apakah junta harus diundang ke KTT dan mendesak Negara Anggota lainnya untuk sampai pada kesimpulan yang sama.

Kredibilitas ASEAN tergantung pada kemampuannya untuk bertindak tegas dan mengakhiri kekerasan junta militer Myanmar yang tanpa henti terhadap rakyatnya. Kurangnya ketegasan dan konsekuensi atas penghinaan total pihak militer terhadap kesepakatan para pemimpin ASEAN berisiko merusak legitimasi blok ini sebagai pemain regional utama yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas.

Pada 24 April 2021, para pemimpin sembilan Negara Anggota dan junta Myanmar, yang diwakili oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyepakati konsensus yang mencakup "penghentian kekerasan dengan segera", dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, bantuan kemanusiaan yang akan dikirim ke negara itu, dan kunjungan Utusan Khusus dan delegasi mengunjungi Myanmar guna "bertemu dengan semua pihak terkait".

Junta Myanmar telah gagal untuk menghormati konsensus ini pada setiap butirnya.

Sejak junta Myanmar setuju untuk segera menghentikan kekerasan pada 25 April hingga akhir September telah terjadi 3.534 serangan baik terhadap warga sipil oleh militer atau bentrokan bersenjata yang gagal melindungi warga sipil - meningkat 840% dari periode yang sama tahun 2020 (376). Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan telah didokumentasikan. Jelas bahwa pemimpin junta Min Aung Hlaing tidak akan berhenti dalam usahanya untuk menghancurkan oposisi demokratis terhadap pemerintahannya.

Pihak militer juga terus-menerus menentang segala bentuk dialog. Zaw Min Tun, juru bicara militer, baru-baru ini mengatakan bahwa dialog antara Utusan Khusus ASEAN dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Pemerintah Persatuan Nasional dan Pasukan Pertahanan Rakyat tidak dapat berlangsung karena mereka telah dinyatakan oleh junta sebagai "organisasi ilegal.". Taktik junta untuk mengulur-ulur waktu juga membuat tertundanya penunjukkan Menteri Luar Negeri II Brunei Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

Kami melihat komitmen bantuan yang dibuat ke AHA Center dan disampaikan melalui Palang Merah Myanmar, tetapi, penting untuk diingat bahwa tindakan-tindakan militer Myanmar menciptakan krisis kemanusiaan ini yang menelan negara itu. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tiga juta orang membutuhkan pertolongan. Jumlah itu meningkat tiga kali lipat selama delapan bulan terakhir. Selain itu, sekarang ada 20 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan - hampir setengah dari jumlah penduduk. Namun, junta militer mempersenjatai bantuan kemanusiaan; memblokir distribusi pasokan, menempatkan pembatasan perjalanan bagi pekerja kemanusiaan, menimbun dan menghancurkan bantuan, serta menyerang warga sipil, pekerja bantuan kesehatan dan kemanusiaan.

Jelaslah bahwa militer Myanmar telah dengan mencolok menunjukkan tidak adanya rasa hormat terhadap ASEAN, dan faktanya, sejak kudeta, militer Myanmar tampaknya telah menggunakan blok ini untuk mencoba mendapatkan legitimasi sementara di saat yang sama meningkatkan tindakan pembalasan yang brutal terhadap rakyat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga telah memperingatkan bahwa peluang untuk mencegah junta Myanmar memperkuat kekuasaannya bisa semakin mengecil. Beliau telah meminta tindakan regional dan internasional yang terpadu agar mencegah krisis menjadi konflik berskala besar dan "malapetaka" beraneka segi di Asia Tenggara dan sekitarnya.

Sudah saatnya ASEAN bertindak tegas. Mulai dengan menyangkal legitimasi yang diidamkan oleh junta Myanmar, dan yang terus-menerus ditolak oleh rakyat Myanmar. Junta telah menolak bekerja sama dengan para tetangga di tingkat regional dan internasional, gagal untuk menjaga komitmen yang telah dibuat dan telah mempertontonkan kepada dunia tidak hanya kebrutalan biadabnya tetapi juga ketidakmampuan untuk menangani bencana sosial dan ekonomi yang semakin dalam yang sedang terjadi di negeri itu, termasuk terlantarnya pelayanan kesehatan masyarakat di tengah pandemi global.

Mengulangi pernyataan menteri luar negeri Malaysia dan Indonesia, diperlukan tanggapan yang satu dan tegas dari Negara-negara Anggota lainnya. Tindakan junta Myanmar tidak boleh diterima sebagai "bisnis seperti biasa." Tindakan-tindakan mereka membahayakan stabilitas, kemakmuran, perdamaian, dan kesehatan kawasan ini.

Oleh karena itu kami menyerukan kepada para pemimpin ASEAN untuk menolak kehadiran kepala junta militer Myanmar dan menunjukkan kepadanya bahwa ketidakpeduliannya terhadap rakyat, dan tetangga sekawasannya, tidaklah bebas dari konsekuensi.

Hormat kami,

1. A Lin Thitsar
2. A Lin Yaung Pan Daing
3. A Naga Alin
4. Action Committee for Democracy Development
5. All Arakan Students' and Youths' Congress
6. ALTSEAN Burma
7. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
8. Assistance Association for Political Prisoners
9. Association of Human Rights Defenders and Promoters
10. Athan – Freedom of Expression Activist Organization
11. Backpack Health Workers Team
12. Burma Medical Association
13. Burmese Women's Union

14. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
15. Democracy for Ethnic Minorities Organization
16. Democracy, Peace and Women's Organization – DPW
17. Equality Myanmar
18. FORUM-ASIA
19. Freedom and Labor Action Group
20. Future Light Center
21. Future Thanlwin
22. Generation Wave
23. Human Rights Foundation of Monland
24. Kachin Women's Association Thailand
25. Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)
26. Karen Human Rights Group
27. Karen Peace Support Network
28. Karen River Watch (KRW)
29. Karen Women's Organization
30. Karenni Civil Society Network
31. Karenni Human Rights Group
32. Karenni National Women's Organization
33. Keng Tung Youth
34. Let's Help Each Other
35. Metta Campaign Mandalay
36. Myanmar Peace Bikers
37. Myanmar People Alliance (Shan State)
38. Network for Advocacy Action Tanintharyi Women Network
39. Network for Human Rights Documentation – Burma (ND-Burma)
40. Olive Organization
41. Progressive Voice
42. Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas
43. Save the Salween Network (SSN)
44. Shan MATA
45. Southern Youth Development Organization
46. Spring Revolution Interfaith Network
47. Synergy - Social Harmony Organization
48. Tanintharyi MATA
49. Thint Myat Lo Thu Myar
50. Union of Karenni State Youth
51. Women Advocacy Coalition – Myanmar
52. Women's League of Burma
 - a. Burmese Women's Union (BWU)
 - b. Kachin Women's Association-Thailand (KWAT)
 - c. Karen Women's Organization (KWO)
 - d. Karenni National Women's Organization (KNWO)

- e. Kayan Women's Organization (KyWO)
- f. Kuki Women's Human Rights Organization (KWHRO)
- g. Lahu Women's Organization (LWO)
- h. Pa-O Women's Union (PWU)
- i. Shan Women's Action Network (SWAN)
- j. Ta'ang Women's Organization (TWO)
- k. Tavoy Women's Union (TWU)
- l. Women for Justice (WJ)